

Implikasi Komunikasi Organisasi dalam Pengambilan Keputusan: Studi Kasus Integrasi Polri ke Dalam Kemendagri

¹Kezia Marlinata Sinaga, ²Agustina Fita Lestari, ³Daniel Gilbert Sinaga, ⁴Yusuf
Fadila, ⁵Fatkhuri

¹2310413086@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2310413075@mahasiswa.upnvj.ac.id,

³2310413070@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2310413027@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁵fatkhuri@upnvj.ac.id

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ABSTRACT

The integration of the Indonesian National Police (Polri) into the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) is a strategic issue that has generated debate among policy makers and academics. This study analyzes the implications of organizational communication in decision making regarding this integration. Using a descriptive qualitative approach with literature study methods, this research found that organizational communication has a central role in ensuring the effectiveness of coordination, adaptation of organizational culture, and conflict resolution between institutions. The results of the analysis show that differences in hierarchy and organizational culture between the National Police and the Ministry of Home Affairs have the potential to create communication barriers that can influence the decision-making process. Therefore, a more inclusive, transparent and participation-based communication strategy is needed to support the success of this integration.

Keywords: Organizational communication, Polri integration, Ministry of Home Affairs, decision making, institutional coordination.

ABSTRAK

Integrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan isu strategis yang menimbulkan perdebatan di kalangan pembuat kebijakan dan akademisi. Studi ini menganalisis implikasi komunikasi organisasi dalam pengambilan keputusan terkait integrasi tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi organisasi memiliki peran sentral dalam memastikan efektivitas koordinasi, adaptasi budaya organisasi, dan resolusi konflik antar lembaga. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan hierarki dan budaya organisasi antara Polri dan Kemendagri berpotensi menciptakan hambatan komunikasi yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis partisipasi untuk mendukung keberhasilan integrasi ini.

Kata Kunci: Komunikasi organisasi, integrasi Polri, Kementerian Dalam Negeri, pengambilan keputusan, koordinasi institusi.

Pendahuluan

Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia. Sebagai institusi yang mandiri, Polri memiliki struktur organisasi, fungsi, dan wewenang yang terpisah dari lembaga pemerintahan lainnya, meskipun secara administratif berada di bawah Presiden.

Wacana integrasi Polri ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menjadi topik diskusi yang penting di kalangan pembuat kebijakan dan akademisi. Usulan ini muncul dengan pertimbangan bahwa Polri, sebagai aparat penegak hukum, memiliki peran yang sangat erat dengan pemerintah daerah dan urusan dalam negeri, sehingga penempatan Polri di bawah Kemendagri diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dalam penegakan hukum di daerah serta mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap institusi tersebut (Rachman, 2022), ada kekhawatiran bahwa integrasi ini dapat mengurangi independensi Polri dan membuka peluang bagi intervensi politik dalam penegakan hukum. Sebagai institusi yang seharusnya netral, integrasi ke dalam struktur kementerian yang politis bisa mengganggu objektivitas Polri dalam menjalankan tugasnya (Setiadi, 2023). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi komunikasi organisasi dan proses pengambilan keputusan dalam institusi Polri dan Kemendagri.

Komunikasi organisasi memegang peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, terutama saat terjadi perubahan struktural besar seperti integrasi Polri ke dalam Kemendagri. Komunikasi yang efektif dalam organisasi tidak hanya memastikan informasi yang tepat sampai ke setiap tingkat dalam hierarki, tetapi juga memfasilitasi partisipasi anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat meningkatkan kualitas dan legitimasi keputusan yang diambil (Robbins & Judge, 2018).

Perubahan struktural, seperti integrasi Polri ke Kemendagri, komunikasi organisasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mengelola berbagai tantangan yang mungkin timbul. Perubahan semacam ini biasanya melibatkan penyesuaian pada struktur, prosedur, dan budaya organisasi yang telah lama terbangun. Jika komunikasi tidak dikelola dengan baik, misinformasi atau ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menyebabkan kebingungan, penurunan moral, dan resistensi terhadap perubahan (Kotter, 1996).

Sebaliknya, komunikasi yang transparan dan terkoordinasi dengan baik dapat membantu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan adaptasi, dan meminimalkan konflik internal selama proses perubahan. Hal ini juga memungkinkan pemimpin organisasi untuk secara proaktif menangani masalah yang muncul dan membuat keputusan yang lebih baik yang mendukung keberhasilan integrasi (Lunenburg, 2010). Bagaimana integrasi Polri ke dalam Kemendagri mempengaruhi proses pengambilan keputusan? Dan Apa saja tantangan komunikasi organisasi yang muncul dari integrasi ini?

David Easton dalam teorinya menjelaskan bahwa sistem politik adalah sebuah mekanisme yang terdiri atas berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi masyarakat. Sistem ini bekerja berdasarkan proses input, konversi, dan output, di mana komunikasi organisasi menjadi salah satu elemen krusial dalam menjaga efisiensi sistem tersebut (Nadapdap, 2015).

Dalam integrasi Polri ke dalam Kemendagri, teori sistem politik relevan karena:

1. Proses Input: Aspirasi masyarakat, kebutuhan keamanan nasional, dan kepentingan kebijakan pemerintah berperan sebagai input yang harus diakomodasi dalam pengambilan keputusan (Riskiyono, 2015). Komunikasi

organisasi dalam tahap ini memastikan bahwa informasi dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dapat tersampaikan dengan jelas dan lengkap.

2. Proses Konversi: Interaksi antara berbagai aktor politik dan administratif (Polri, Kemendagri, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mengolah input menjadi kebijakan. Komunikasi organisasi di tahap ini berperan dalam mengintegrasikan kepentingan yang berbeda, mencegah miskomunikasi, dan membangun konsensus (Saffero, 2017).
3. Proses Output: Keputusan yang dihasilkan berupa kebijakan strategis, struktur kerja baru, atau peraturan operasional. Output yang efektif hanya dapat tercapai melalui komunikasi organisasi yang terstruktur dan partisipatif, di mana semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya.

Komunikasi organisasi menjadi elemen esensial dalam memastikan bahwa integrasi ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga secara politis dan strategis mampu merespons tuntutan sistem politik yang lebih besar.

1. Teori Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi adalah proses di mana informasi, makna, dan pemahaman dipertukarkan untuk mencapai tujuan bersama (Mumby, Dennis K, 2013). Teori ini sangat relevan dalam memahami bagaimana Polri dan Kemendagri berkolaborasi dalam pengambilan keputusan (Morissan, 2020).

1. Dimensi Formal dan Informal: Komunikasi formal, seperti rapat resmi dan surat edaran, memastikan bahwa proses integrasi berjalan sesuai dengan aturan (Irwanti, 2023). Sementara itu, komunikasi informal, seperti diskusi antar pejabat atau kelompok kerja, berperan dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan bersama.
2. Kultur Organisasi: Integrasi antara dua lembaga dengan kultur organisasi yang berbeda memerlukan pendekatan komunikasi yang adaptif (Purbaningrum, 2019). Komunikasi yang efektif memungkinkan terciptanya *shared meaning* sehingga perbedaan nilai, kebiasaan, dan persepsi tidak menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan.
3. Pengelolaan Konflik: Dalam proses integrasi, potensi konflik antarunit sangat besar. Komunikasi organisasi membantu dalam identifikasi isu-isu sensitif, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan membangun kepercayaan di antara aktor-aktor yang terlibat (Suharyanto, 2016).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena komunikasi organisasi dalam pengambilan keputusan, khususnya pada integrasi Polri ke dalam Kemendagri. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sumber yang telah ada, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, laporan resmi, dan artikel relevan (Firmansyah, 2022).

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari literatur yang relevan, baik yang diperoleh melalui pencarian di basis data akademik maupun sumber terpercaya lainnya (Grashinta, 2023). Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian. Analisis dilakukan secara

deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara komunikasi organisasi dan pengambilan keputusan tanpa mengubah substansi data yang ada (Dharmalaksana, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun temuan dalam bentuk narasi yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti secara komprehensif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan yang mendalam serta mendukung pengembangan teori dan kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintahan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Berdasarkan Teori Sistem Politik.

Teori sistem politik memberikan kerangka kerja untuk memahami dinamika hubungan antara aktor-aktor dalam sistem politik yang lebih besar (David Easton, 1984). Dalam integrasi Polri ke dalam Kemendagri, komunikasi organisasi menjadi salah satu elemen kunci yang memengaruhi keberhasilan proses ini, karena memfasilitasi aliran informasi, koordinasi kebijakan, dan penyesuaian kepentingan di antara para pemangku kepentingan (Elizamiharti & Nelfira, 2024).

Tahap input dalam teori sistem politik melibatkan penyampaian aspirasi, kebutuhan, atau tuntutan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, elite politik, dan lembaga negara lainnya (Wasaraka, 2024). Dalam kasus integrasi ini, berbagai masukan yang muncul mencakup dorongan untuk meningkatkan koordinasi antara institusi keamanan dan pemerintahan sipil, serta tuntutan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keamanan nasional. Masalah komunikasi sering muncul pada tahap ini, terutama jika terdapat kesenjangan persepsi antara lembaga terkait atau ketidaksesuaian dalam memahami urgensi integrasi.

Proses konversi adalah tahap di mana input diolah menjadi keputusan atau kebijakan. Pada tahap ini, komunikasi organisasi berperan sebagai alat untuk mengintegrasikan berbagai pandangan, menyelesaikan konflik antar lembaga, dan membangun konsensus (Rakhmaniar, 2024). Dalam integrasi Polri-Kemendagri, tantangan terbesar adalah harmonisasi antara struktur hierarki militeristik Polri dengan pola birokrasi sipil yang lebih fleksibel di Kemendagri.

Ketidakefektifan komunikasi pada tahap ini dapat mengakibatkan penolakan internal dari pihak-pihak tertentu di Polri yang merasa kehilangan otonomi atau di Kemendagri yang merasa terbebani oleh tambahan fungsi baru. Perbedaan kultur organisasi di antara keduanya dapat menyebabkan miskomunikasi dalam menentukan pembagian peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, proses konversi membutuhkan komunikasi yang inklusif, partisipatif, dan transparan untuk meminimalkan potensi gesekan.

Hasil akhir dari proses integrasi adalah keputusan atau kebijakan yang diimplementasikan untuk mengubah struktur hubungan antara Polri dan Kemendagri. Keberhasilan output ini sangat bergantung pada bagaimana komunikasi organisasi mendistribusikan informasi mengenai keputusan yang diambil kepada seluruh pihak terkait. Jika komunikasi pada tahap ini kurang efektif, implementasi kebijakan berisiko menghadapi resistensi dari unit kerja atau individu yang merasa tidak memahami perubahan yang terjadi. Apabila informasi tentang tujuan dan manfaat integrasi tidak dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh anggota Polri

dan Kemendagri, maka kebijakan integrasi ini mungkin hanya diterima secara formal, tanpa dukungan substansial dari aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, komunikasi organisasi tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan keputusan, tetapi juga untuk membangun pemahaman kolektif yang diperlukan bagi keberhasilan implementasi.

Analisis Berdasarkan Teori Komunikasi Organisasi

Komunikasi formal, seperti rapat koordinasi, surat keputusan, atau dokumen kebijakan, memegang peran penting dalam menyusun struktur integrasi. Namun, komunikasi formal ini sering kali tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi integrasi, terutama jika tidak didukung oleh komunikasi informal yang efektif (Mumby, Dennis K, 2013).

Namun, penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi informal sering kali terhambat oleh perbedaan hierarki dan budaya organisasi antara Polri dan Kemendagri (Briantika, 2022). Hierarki yang kaku di Polri dapat menciptakan rasa enggan bagi pegawai bawahan untuk menyampaikan pendapat mereka secara langsung, sehingga mengurangi aliran informasi yang penting bagi pengambilan keputusan. Di sisi lain, pendekatan birokrasi yang lebih fleksibel di Kemendagri mungkin dipandang kurang sesuai oleh Polri, sehingga menciptakan hambatan komunikasi lintas institusi.

Proses integrasi ini secara alami menghadirkan potensi konflik, baik di tingkat struktural maupun personal. Dalam situasi seperti ini, komunikasi organisasi memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik dengan menciptakan dialog yang konstruktif. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi yang ada belum sepenuhnya memadai untuk mengatasi konflik tersebut. Kurangnya mekanisme formal untuk menyelesaikan perbedaan pandangan sering kali menyebabkan konflik berkembang menjadi resistensi terhadap kebijakan yang dirancang (Briantika, 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih terencana, seperti pembentukan tim khusus yang berfungsi sebagai mediator antar lembaga untuk memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan secara efisien.

Salah satu tantangan utama dalam integrasi ini adalah membangun pemahaman bersama (*shared meaning*) antara Polri dan Kemendagri tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme kerja integrasi. Perbedaan nilai dan kultur organisasi sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan pemahaman bersama ini. Tanpa *shared meaning*, proses integrasi berisiko menjadi sekadar perubahan struktural tanpa dukungan substansial dari para aktor yang terlibat. Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi organisasi belum sepenuhnya mampu menciptakan *shared meaning* yang diperlukan. Hal ini terlihat dari masih adanya pandangan berbeda di antara aktor-aktor yang terlibat mengenai urgensi dan manfaat integrasi (Briantika, 2022). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komunikasi yang lebih intensif dan strategis, seperti pelatihan bersama atau forum diskusi lintas institusi, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menciptakan visi bersama.

Pembahasan

Setelah integrasi Polri ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), struktur komunikasi organisasi mengalami perubahan signifikan. Sebelumnya, Polri

beroperasi secara mandiri di bawah Presiden, dengan struktur komunikasi yang berfokus pada jalur komando vertikal yang ketat dari pusat ke daerah melalui hierarki yang jelas. Namun, dengan integrasi ini, Polri harus menyesuaikan diri dengan struktur birokrasi yang ada di Kemendagri, yang cenderung lebih horizontal dan kompleks. Hal ini mengharuskan adanya penyesuaian dalam alur komunikasi agar tetap efisien dan efektif (Handoko, 2023).

Penyesuaian ini termasuk dalam pengaturan kembali jalur komunikasi resmi yang memungkinkan koordinasi yang lebih erat antara Polri dan unit-unit lain di Kemendagri. Struktur komunikasi yang baru harus memastikan bahwa setiap informasi penting terkait kebijakan keamanan dan ketertiban publik dapat disampaikan dengan cepat dan akurat ke berbagai pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah (Sutrisno, 2022).

Integrasi Polri ke dalam Kemendagri juga memengaruhi jalur komunikasi, baik resmi maupun informal. Dalam struktur sebelumnya, jalur komunikasi resmi Polri terutama dilakukan melalui rantai komando yang ketat. Namun, setelah integrasi, jalur komunikasi resmi harus lebih adaptif terhadap sistem yang ada di Kemendagri, di mana keputusan sering kali melibatkan proses konsultasi dan koordinasi yang lebih panjang (Mulyadi, 2023).

Selain itu, jalur komunikasi informal menjadi lebih penting baru ini. Interaksi informal antara pejabat Polri dan staf Kemendagri dapat menjadi kunci untuk memastikan kelancaran operasi sehari-hari dan mencegah miskomunikasi. Jalur komunikasi informal ini, jika dikelola dengan baik, dapat mempercepat proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang memerlukan respon cepat (Robbins & Judge, 2018).

Perubahan dalam struktur dan jalur komunikasi setelah integrasi juga berdampak langsung pada proses pengambilan keputusan dan alur kerja di Polri dan Kemendagri. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks karena harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dari berbagai unit di Kemendagri. Hal ini dapat memperlambat pengambilan keputusan jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang efektif dan prosedur yang jelas (Lunenburg, 2010), jika jalur komunikasi diatur dengan baik, integrasi ini dapat memperkuat pengambilan keputusan melalui kolaborasi yang lebih baik antara Polri dan Kemendagri. Alur kerja yang lebih terkoordinasi juga dapat meningkatkan responsivitas terhadap isu-isu keamanan dan ketertiban di tingkat nasional maupun daerah (Handoko, 2023). Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan mengoptimalkan struktur komunikasi yang ada agar proses pengambilan keputusan tetap efisien dan efektif.

Integrasi Polri ke dalam Kemendagri membuka peluang bagi terjadinya konflik atau miskomunikasi antar lembaga. Polri, yang sebelumnya merupakan entitas yang berdiri sendiri dengan budaya dan prosedur operasionalnya sendiri, kini harus menyesuaikan diri dengan struktur birokrasi yang berbeda di Kemendagri. Potensi konflik dapat muncul ketika ada perbedaan persepsi atau pemahaman tentang tugas dan wewenang masing-masing pihak. Sebagai contoh, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, koordinasi antara unit Polri dan divisi lain di Kemendagri bisa terhambat, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan (Mulyadi, 2023).

Miskomunikasi juga bisa terjadi ketika ada perbedaan dalam penggunaan terminologi atau pendekatan dalam menjalankan tugas. Misalnya, Polri yang terbiasa dengan komando langsung dan tegas mungkin merasa kesulitan beradaptasi dengan gaya komunikasi yang lebih konsultatif dan prosedural yang lazim di Kemendagri (Robbins & Judge, 2018).

Salah satu tantangan utama dalam integrasi ini adalah penyatuan budaya organisasi antara Polri dan Kemendagri. Polri memiliki budaya organisasi yang kental dengan disiplin militer, hierarki yang ketat, dan orientasi pada tindakan cepat dan tegas. Sementara itu, Kemendagri sebagai lembaga pemerintahan sipil lebih birokratis dengan prosedur yang panjang dan penuh pertimbangan (Handoko, 2023).

Hambatan budaya ini dapat memperlambat proses penyatuan organisasi dan menimbulkan resistensi dari kedua belah pihak. Pegawai di Kemendagri mungkin merasa bahwa pendekatan Polri terlalu kaku dan tidak sesuai dengan budaya kerja mereka, sementara anggota Polri mungkin menganggap proses di Kemendagri terlalu lamban dan tidak efisien. Perbedaan ini harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan perpecahan dan dapat tercipta sinergi yang positif di antara kedua organisasi (Kotter, 1996).

Perbedaan dalam struktur dan budaya organisasi juga dapat mempengaruhi koordinasi dan respons institusi terhadap isu-isu kritis. Ketika terjadi krisis, seperti bencana alam atau situasi keamanan yang membutuhkan respons cepat, perbedaan dalam prosedur dan jalur komunikasi dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Polri, yang terbiasa dengan respon cepat, mungkin merasa terganggu oleh prosedur yang lebih lambat di Kemendagri, yang dapat menghambat tindakan segera yang diperlukan dalam situasi darurat (Lunenburg, 2010).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang serius dalam membangun jalur komunikasi yang efisien dan mengintegrasikan prosedur operasional standar yang dapat diadopsi oleh kedua lembaga. Selain itu, pelatihan dan pembekalan bagi anggota kedua organisasi tentang budaya dan prosedur masing-masing dapat membantu meminimalkan hambatan ini dan memperkuat koordinasi di lapangan (Sutrisno, 2022).

Rekomendasi

Dalam integrasi Polri ke dalam Kemendagri, strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu dan berbasis informasi. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pengembangan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan umpan balik dari semua tingkatan organisasi. Dengan menerapkan komunikasi dua arah, tidak hanya kebijakan dari pusat yang disosialisasikan ke bawah, tetapi juga masukan dari lapangan dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan (Robbins & Judge, 2018).

Untuk memastikan komunikasi yang lebih efisien dan transparan, dibutuhkan kebijakan komunikasi yang jelas dan konsisten yang harus diikuti oleh semua anggota organisasi. Kebijakan ini harus mencakup pedoman tentang bagaimana informasi harus disebarluaskan, siapa yang bertanggung jawab dalam setiap langkah komunikasi, dan standar untuk pelaporan dan dokumentasi informasi penting (Sutrisno, 2022).

Penggunaan alat komunikasi dan manajemen proyek digital juga disarankan untuk meningkatkan efisiensi. Alat-alat ini dapat membantu dalam pelacakan tugas, memastikan bahwa semua anggota tim memiliki akses ke informasi yang sama, dan memungkinkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tidak hanya proses komunikasi yang lebih cepat dan terorganisir, tetapi juga pengawasan dan akuntabilitas dapat ditingkatkan (Mulyadi, 2023).

Penutup

Berdasarkan analisis dengan teori sistem politik dan teori komunikasi organisasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi memegang peran yang sangat penting dalam mendukung proses integrasi Polri ke Kemendagri. Namun, efektivitas komunikasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan budaya organisasi, kurangnya koordinasi lintas institusi, dan minimnya upaya untuk menciptakan shared meaning. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan integrasi ini, diperlukan penguatan mekanisme komunikasi organisasi yang lebih inklusif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan para aktor yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Briantika, A. (2022). *Menelaah Wacana Polri di Bawah Kementerian, Apa Untung Ruginya?* Dharmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- David Easton, (1984). *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, judul asli "A Framework for Political Analysis" terj. Sahat Simamora, Jakarta: Bina Aksara.
- Elizamiharti, & Nelfira. (2024). *Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik*. 2(1). <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>
- Firmansyah, D. (2022). *Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review*. 1(2). <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Grashinta, A. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Handoko, T. H. (2023). *Manajemen: Prinsip dan Aplikasi dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Irwanti, M. (2023). *MANAJEMEN KRISIS KOMUNIKASI (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Boston: Harvard Business School Press.
- Lunenburg, F. C. (2010). Communication: The Process, Barriers, And Improving Effectiveness. *Schooling*, 1(1), 1-11.
- Mulyadi, D. (2023). *Birokrasi dan Pengambilan Keputusan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mumby, Dennis K. (2013). *Organizational Communication: A Critical Approach*. California: SAGE Publications Inc.
- Morissan. (2020). *Komunikasi Organisasi*.
- Nadapdap, K. M. N. (2015). *PERANAN KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI KERJA*.
- Purbaningrum, D. (2019). *Organisasi dan Komunikasi*. Universitas Terbuka.

- Rachman, F. (2022). *Kajian Integrasi Polri ke Dalam Kemendagri: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Kencana.
- Rakhmaniar, A. (2024). *Komunikasi Krisis Dalam Organisasi: Analisis Naratif Tentang Pengelolaan Konflik Internal*. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.243>
- Riskiyono, J. (2015). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN*.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). *Organizational Behavior* (18th ed.). New York: Pearson.
- Saffero, A. (2017). *Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit: Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang*.
- Setiadi, I. (2023). *Independensi Polri: Dampak Integrasi ke Dalam Kemendagri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suharyanto, A. (2016). *Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat*.
- Sutrisno, E. (2022). *Komunikasi Organisasi: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Wasaraka, H. (2024). *Reformasi Hukum untuk Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Sistem Demokratis*. 3(1).